



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

**KOMISI VIII DPR RI (BIDANG AGAMA, SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEBENCANAAN)**

Tahun Sidang	: 2024-2025
Masa Persidangan	: I
Rapat Ke	: 7
Jenis Rapat	: Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat
Dengan	: Menteri Agama RI, Menteri Perhubungan RI, dan Menteri Kesehatan RI, serta Kepala Pelaksana BPKH, Kepala Badan Penyelenggara Haji dan Direktur PT Garuda Indonesia.
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Rabu, 30 Oktober 2024.
Waktu	: pukul 13.00 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung Nusantara II lantai 1 Jln. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270
Acara	: 1. Evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 1445 H/ 2024 M; 2. Laporan keuangan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1445 H / 2024 M; 3. Isu – isu aktual.
Ketua Rapat	: H. Marwan Dasopang
Sekretaris Rapat	: Mc. Zaqki Zachariaz Thamrin
Hadir	: 1. 27 dari 41 Anggota Komisi VIII DPR RI; 2. 14 Anggota Komisi VIII DPR RI Izin; 3. Menteri Agama beserta jajarannya; 4. Kepala Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan beserta jajaran; 5. Direktur Kelaikudaraan Pengoperasian Pesawat Udara Kemnterian Perhubungan beserta jajaran 6. kepala badan pelaksana badan pengelola keuangan haji beserta jajaran; 7. Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji beserta jajaran;

8. Direktur Utama PT. GARUDA INDONESIA beserta jajarannya.

I. PENDAHULUAN:

1. Ketua Rapat membuka Rapat Komisi VIII DPR RI pada pukul 15.50 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi VIII DPR RI, H. Marwan Dasopang, M.Si., dan didampingi oleh para Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, H. Abidin Fikri, S.H., M.H., H. Singgih Januratomoko, S.K.H., M.M., H. Abdul Wachid, dan H. Anshori Siregar, Lc., sesuai waktu dan tempat acara tersebut di atas.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Pada Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama RI, Menteri Kesehatan RI yang diwakili Kepala Pusat Kesehatan Haji, Menteri Perhubungan RI yang diwakili Direktur Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara serta Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Badan Pelaksana BPKH dan Direktur Utama PT. Garuda Indonesia, membahas “**Evaluasi dan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1445 H/2024 M serta Isu-isu Aktual**”, disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Komisi VIII DPR RI berpendapat bahwa Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 1445 H/2024 M tidak sesuai dengan Keputusan Panja BPIH tanggal 27 November 2023 dan Keppres Nomor 6 Tahun 2024 tetapi hanya mendasarkan pada kebijakan Menteri Agama RI periode 2020-2024.
- b. Komisi VIII DPR RI berpendapat bahwa Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 1445 H/2024 M sepenuhnya merupakan tanggung jawab Menteri Agama RI sebelumnya (periode 2020-2024).
- c. Komisi VIII DPR RI dapat memaklumi efisiensi sebesar Rp601.297.789.718 seperti termuat pada Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1445 H/2024 M dan sepakat untuk mengakhiri pembahasan pertanggungjawaban Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1445 H/2024 M serta dapat memulai pembahasan pendahuluan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 1446 H/2025 M.

- d. Komisi VIII DPR RI mendesak Pemerintah RI (Kementerian Agama RI dan Lembaga terkait) untuk melakukan perbaikan kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1446 H/2025 M.

III. P E N U T U P

Rapat ditutup pukul 17.05 WIB.

**PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI
KETUA,**

TTD

H. MARWAN DASOPANG